

Comparative Financial Performance Of Regency And Municipal Governments In Central Java And East Java And Its Implications For Economic Growth

Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Jawa Tengah Dan Jawa Timur Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Shinta Dwi Maharani¹, Banu Witono^{2*}

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

b200220473@student.ums.ac.id¹, bw257@ums.ac.id^{2*}

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparative financial performance of district and city governments in East Java and Central Java Provinces and their impact on economic growth in 2020-2023. This study uses a saturated sample where the entire population will be sampled. This study uses two tests: a difference test and a hypothesis test. The normality test in this study uses the one-sample Kolmogorov-Smirnov test method and concluded that the data is not normally distributed. Therefore, the difference test uses the non-parametric Mann-Whitney test and the hypothesis test uses multiple linear regression analysis with the Central Limit Theorem (CLT) assumption. The results of the research analysis on the difference test show that there is no significant difference in the fiscal independence ratio, and there is a significant difference between the financial effectiveness ratio, financial efficiency ratio, and capital expenditure ratio between the East Java and Central Java Provincial Governments. The results of the hypothesis test study indicate that the variables of the fiscal independence ratio, financial effectiveness ratio, and financial efficiency ratio have a positive and significant effect on economic growth, while the capital expenditure ratio has no effect on economic growth.

Keywords: *Fiscal Independence Ratio, Financial Effectiveness Ratio, Financial Efficiency Ratio, Capital Expenditure Ratio, Economic Growth*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode 2020–2023. Penelitian memanfaatkan sampel jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian menerapkan dua jenis pengujian, yaitu uji beda dan uji hipotesis. Uji normalitas dalam penelitian mengaplikasikan metode one-sample Kolmogorov–Smirnov dan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji beda dilakukan menggunakan uji nonparametrik Mann–Whitney, sementara uji hipotesis mengaplikasikan analisis regresi linear berganda dengan asumsi Central Limit Theorem (CLT). Hasil analisis uji beda mengonfirmasi bahwasanya tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio kemandirian fiskal, sedangkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio efektivitas keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio belanja modal antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hasil uji hipotesis menginformasikan rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas keuangan, dan rasio efisiensi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara rasio belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan, Rasio Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

1. Pendahuluan

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih menjadi isu krusial dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengindikasikan tren meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut belum

sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan pemerataan, salah satunya dipengaruhi oleh dinamika globalisasi (Lestari *et al.*, 2022). Ketidakeimbangan struktur ekonomi, keterbatasan infrastruktur, ketimpangan pembangunan regional, serta ketidakpastian kebijakan dan perbedaan sumber daya antar wilayah turut memperlebar disparitas pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah (Yuniarti *et al.*, 2020). Situasi ini membuktikan bahwa kemajuan ekonomi tidak semata-mata bergantung pada indikator makro pusat, melainkan juga pada kemampuan fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

Dalam periode 2020 - 2023, perekonomian Indonesia mengalami dinamika signifikan. Krisis kesehatan global mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 menyusut ke angka -2,07%, memperlemah daya beli dan kondisi ekonomi secara umum (Maharani dan Marheni, 2022). Tahun 2021 mencatat pemulihan sebesar 3,70%, meskipun investasi asing mengalami penurunan akibat guncangan ekonomi global yang berlanjut (Nurhayati dan Juliansyah, 2023). Pada 2022, pertumbuhan meningkat menjadi 5,31%, namun tekanan inflasi global terutama kenaikan harga pangan berdampak pada inflasi domestik (Hutagaol *et al.*, 2022). Tahun 2023, pertumbuhan mencapai 5,05% dengan tantangan berupa perubahan cuaca yang memicu kenaikan harga pangan, perlambatan ekonomi global, serta tekanan fiskal akibat peningkatan kebutuhan belanja sosial (Fitriyani *et al.*, 2024). Secara agregat, capaian tersebut menunjukkan ketahanan ekonomi yang relatif kuat, bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan negara Asia Tenggara (Rusmini *et al.*, 2023), namun tetap membutuhkan reformasi struktural dan kebijakan adaptif untuk menjaga stabilitas pertumbuhan di tengah ketidakpastian global (Purwadi *et al.*, 2020).

Proses kemajuan ekonomi mencakup perbaikan indikator keuangan secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih kuat (Zulkarnain *et al.*, 2019). Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, karena pengelolaan keuangan yang efektif mampu mendorong investasi, produktivitas, dan inovasi (Ratnawati dan Sari, 2023). Besaran ekonomi daerah tercermin dari angka PDRB, yang menjumlahkan semua output ekonomi selama masa waktu tertentu (Ernawati, 2024), serta menjadi indikator utama evaluasi kinerja ekonomi daerah (Pantas *et al.*, 2019; Prihatin *et al.*, 2019).

Kinerja keuangan daerah merepresentasikan kompetensi otoritas lokal dalam mengalokasikan sumber daya fiskal demi pemenuhan kewajiban administratif dan target-target pembangunan wilayah (Karina dan Wibowo, 2022; Kopong, 2019). Kinerja tersebut dapat ditelaah melalui rasio keuangan, mencakup Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan, dan Rasio Belanja Modal (Riady *et al.*, 2024). Ruang lingkup studi dibatasi pada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur periode 2020–2023, mengingat kedua provinsi berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Analisis perbandingan diperlukan untuk mengevaluasi kesehatan fiskal antar wilayah dan mengidentifikasi area perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah (Putri dan Junaidi, 2020), terutama karena masih tingginya ketergantungan fiskal kabupaten/kota terhadap pemerintah pusat yang berpotensi menekan kemandirian daerah (Solihin, 2025). Selain itu, adanya temuan penelitian terdahulu yang beragam menegaskan perlunya pengujian ulang pada objek dan periode yang berbeda (Putri dan Junaidi, 2020; Ernawati, 2024; Venni *et al.*, 2023; Amalia dan Akbar, 2022).

2. Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) sebagai Kerangka Teoretis

Penelitian ini berlandaskan *Stewardship Theory* untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik (steward) menjalankan mandat masyarakat sebagai pemilik sumber daya (principal). *Stewardship theory* menekankan bahwa manajemen cenderung memprioritaskan kepentingan organisasi dibanding kepentingan

pribadi, sehingga berorientasi pada pencapaian tujuan kolektif (Donaldson and Davis, 1991). Perspektif ini mengasumsikan bahwa manusia memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung kejujuran dalam menjalankan amanah (Murwaningsari, 2006). Dalam konteks otonomi daerah, teori ini relevan karena menempatkan pemerintah sebagai pihak yang wajib mengelola dan mendistribusikan sumber daya secara efektif dan akuntabel, sehingga kinerja keuangan dapat dipertanggungjawabkan serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada tren peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah guna mencapai keadaan yang lebih sejahtera selama masa observasi tertentu. Indikator PDRB ditetapkan guna merepresentasikan pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus variabel dependen dalam studi ini (Zulkarnain *et al.*, 2019). PDRB harga berlaku merepresentasikan akumulasi nilai produk pada tahun yang bersangkutan, sedangkan PDRB harga konstan digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi secara riil terhadap tahun acuan (Putri dan Junaidi, 2020). Peningkatan PDRB mencerminkan kenaikan output dan aktivitas ekonomi daerah, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja dan memperkuat perekonomian lokal melalui ekspansi produksi (Ratnawati dan Sari, 2023). Dengan demikian, pertumbuhan PDRB menjadi ukuran yang relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah secara agregat.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menjadi bukti autentik dari kesiapan dan kemampuan pemda dalam melaksanakan kewenangan otonom yang diberikan negara. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2014, guna mencapai status berkinerja baik, pemerintah daerah harus memastikan kenaikan PAD dan PDB regionalnya melampaui capaian rata-rata pusat. Pengukuran kinerja keuangan penting untuk menilai efektivitas kebijakan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan mengidentifikasi aspek perbaikan dalam pengalokasian sumber daya (Pantas *et al.*, 2019). Studi mengaplikasikan indikator rasio keuangan daerah mencakup rasio kemandirian fiskal, rasio efektivitas keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio belanja modal sebagai proksi kinerja keuangan (Ernawati, 2024).

Rasio Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal daerah tercermin dari seberapa besar kontribusi PAD dibandingkan dengan aliran dana transfer, yang menunjukkan kemandirian ekonomi daerah tersebut. Kapabilitas daerah dalam pembiayaan mandiri berbanding lurus dengan nilai rasio ini, yang pada gilirannya menurunkan derajat subordinasi fiskal terhadap bantuan eksternal (Runjung *et al.*, 2022). Rasio ini juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengatur dan mendanai program pembangunan secara mandiri.

Rasio Efektivitas Keuangan

Tinggi rendahnya rasio efektivitas menjadi indikator kualitas perencanaan dan eksekusi kebijakan pemungutan pajak serta retribusi daerah. Rasio ini menggambarkan keselarasan perencanaan pendapatan dengan potensi riil daerah. Efisiensi dalam manajemen pendapatan daerah berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah dalam memperkecil celah antara target dan realisasi PAD, sehingga mencerminkan kinerja pengelolaan pendapatan yang optimal (Putri dan Junaidi, 2020).

Rasio Efisiensi Keuangan

Rasio efisiensi keuangan diaplikasikan guna mengevaluasi perbandingan input dan output pelaksanaan anggaran. Rasio ini menginformasikan seberapa efektif belanja daerah

digunakan untuk memperoleh pendapatan serta menggambarkan kemampuan daerah menerapkan perencanaan yang disiplin agar belanja menghasilkan output maksimal (Putri dan Munandar, 2021). Rasio efisiensi yang minimal memberikan indikasi adanya pengendalian belanja yang ketat dan pemanfaatan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Rasio Belanja Modal

Indikator ini memposisikan belanja modal sebagai bentuk investasi daerah yang krusial untuk pembangunan prasarana fisik dalam struktur anggaran secara keseluruhan (Ernawati, 2024). Belanja modal dinilai produktif karena manfaatnya berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran dan dapat memperkuat kapasitas ekonomi daerah apabila dikelola secara efektif.

Pengembangan Hipotesis

Perbedaan Rasio Kemandirian Fiskal dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota antara Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah

Perbedaan nilai rasio kinerja keuangan antardaerah mengindikasikan adanya variasi kapasitas fiskal, efektivitas pengelolaan pendapatan, efisiensi belanja, serta prioritas pembangunan. Pada rasio kemandirian fiskal, perbedaan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan secara mandiri tanpa ketergantungan tinggi pada pusat (Khofifah dan Witono, 2024). (Putri dan Islahuddin (2018) serta Putri dan Islahuddin (2018) serta Tri (2018) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal dapat bervariasi antar wilayah. Khofifah dan Witono (2024) dan Indrijawati *et al.* (2024) juga membuktikan adanya perbedaan signifikan kemandirian fiskal antarprovinsi akibat perbedaan pengembangan potensi pendapatan daerah.

H1a: Terdapat perbedaan Rasio Kemandirian Fiskal antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Perbedaan Rasio Efektivitas Keuangan dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio efektivitas keuangan menggambarkan keberhasilan realisasi PAD terhadap target, sehingga perbedaan rasio ini menunjukkan variasi kualitas pengelolaan pendapatan daerah (Asri, 2016; Deborah dan Mangantar, 2020). Putri dan Islahuddin (2018), Nuraini *et al.* (2019), serta Restiana *et al.* (2024) mengonfirmasi bahwa efektivitas keuangan dapat berbeda antar wilayah.

H1b: Terdapat perbedaan Rasio Efektivitas Keuangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Perbedaan Rasio Efisiensi Keuangan dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Pada rasio efisiensi, perbedaan menunjukkan seberapa jauh belanja daerah sebanding dengan penerimaan. Efisiensi menekankan pengurangan pengeluaran tidak perlu dan alokasi pada aktivitas bernilai tambah (Melmambessy, 2022). Devinci *et al.* (2022), Nuraini *et al.* (2019), Ganie *et al.* (2023), Restiana *et al.* (2024) menemukan variasi efisiensi antar wilayah.

H1c: Terdapat perbedaan Rasio Efisiensi Keuangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Perbedaan Rasio Belanja Modal dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio belanja modal mencerminkan orientasi pembangunan daerah, di mana perbedaan rasio menunjukkan variasi prioritas investasi publik (Ernawati, 2024). Sudarlan *et al.* (2022), Rheswari dan Akbar (2022), serta Venni *et al.*, (2023) menunjukkan belanja modal

dapat berfluktuasi dan berbeda akibat perubahan fokus pembangunan maupun kebijakan fiskal, termasuk pada masa pandemi.

H1d: Terdapat perbedaan Rasio Belanja Modal antara Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio kemandirian fiskal dipandang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi karena daerah yang mandiri memiliki fleksibilitas belanja pembangunan sesuai kebutuhan lokal (Ratnawati dan Sari, 2023). Sejumlah penelitian menemukan pengaruh positif kemandirian fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Amalia dan Akbar, 2022; Ernawati, 2024; Sevigo dan Lathifah, 2024).

H2a: Rasio Kemandirian Fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio efektivitas keuangan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena realisasi PAD yang optimal memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan (Putri dan Junaidi, 2020). Kontribusi rasio efektivitas terhadap pertumbuhan ekonomi didukung oleh Fatmawati (2021), Rezkie *et al.* (2023), serta Nurani dan Saleh (2023).

H2b: Rasio Efektivitas Keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio efisiensi menunjukkan kemampuan pemerintah memaksimalkan output ekonomi dengan input minimal, sehingga efisiensi yang baik mendorong produktivitas daerah (Azizah *et al.*, 2025). Lestari *et al.* (2019), Ernawati (2024), Renggo (2021), Azizah *et al.* (2025) membuktikan adanya pengaruh efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi.

H2c: Rasio Efisiensi Keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Jawa Timur dan Jawa Tengah

Rasio belanja modal diasumsikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena belanja modal mendukung infrastruktur, fasilitas publik, dan investasi jangka Panjang (Kusumadewi dan Ilat, 2016). Putri dan Islahuddin (2018), Lestari *et al.* (2019), Nurani dan Saleh (2023), serta Ernawati (2024) menginformasikan bahwasanya peningkatan belanja modal dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

H2d: Rasio Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.

3. Metode Penelitian

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Metodologi yang diterapkan dalam analisis yakni pendekatan kuantitatif. Studi mengandalkan data sekunder bersumber dari dokumentasi laporan keuangan yang tersedia untuk publik, bukan melalui observasi atau wawancara langsung (Marseno dan Mulyani, 2020). Sumber data pada kinerja keuangan berupa data Laporan Realisasi Anggaran - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) diperoleh dari <https://djpk.kemenkeu.go.id> dan

pertumbuhan ekonomi berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari <https://www.bps.go.id>

Populasi dan Sampel

Populasi studi mencakup keseluruhan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sampel yang diaplikasikan yakni sampel jenuh. Sampel jenuh yakni teknik pengambilan sampel yang menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian, yaitu keseluruhan kabupaten atau kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran – Anggaran dan Belanja Modal (LRA-APBD) tahun 2020-2023 yang diakses melalui website <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Sampel dalam analisis mencakup:

Tabel 1. Keterangan Sampel Penelitian

Provinsi	Kategori	Jumlah	Keterangan
Jawa Timur	Pemerintah Kabupaten	29	Sampel Jenuh
	Pemerintah Kota	6	Sampel Jenuh
Jawa Tengah	Pemerintah Kabupaten	29	Sampel Jenuh
	Pemerintah Kota	9	Sampel Jenuh
Total Sampel		73	

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2025)

Berlandaskan tabel, Ukuran sampel dalam studi ini mencakup 73 entitas pemerintah daerah dengan rentang observasi empat tahun, sehingga terkumpul sebanyak 292 unit data laporan keuangan dan PDRB.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini dapat dilihat dan diukur dengan nilai pertumbuhan PDRB, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Fiskal

Rasio ini diaplikasikan guna mengkaji tingkat kemandirian daerah yang diukur seberapa besar perbandingan PAD dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi serta pinjaman. Kapabilitas daerah dalam mendanai kegiatannya secara mandiri dianggap meningkat seiring dengan mengecilnya porsi ketergantungan terhadap bantuan pusat..

$$\text{RKF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio Efektivitas Keuangan

Rasio ini mengukur seberapa baik pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan pendapatan yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi hasil rasio ini diinterpretasikan bahwa pemerintah dalam untuk memungut PAD juga semakin tinggi, begitu pula sebaliknya (Tri, 2018).

$$\text{REfk} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi Keuangan

Rasio ini mengukur terkait bagaimana pemerintah melakukan penghematan dalam belanja daerahnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara total realisasi belanja dan pendapatan (Kusumadewi dan Ilat, 2016).

$$REfs = \frac{\text{Total Realisasi Belanja (Pengeluaran)}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

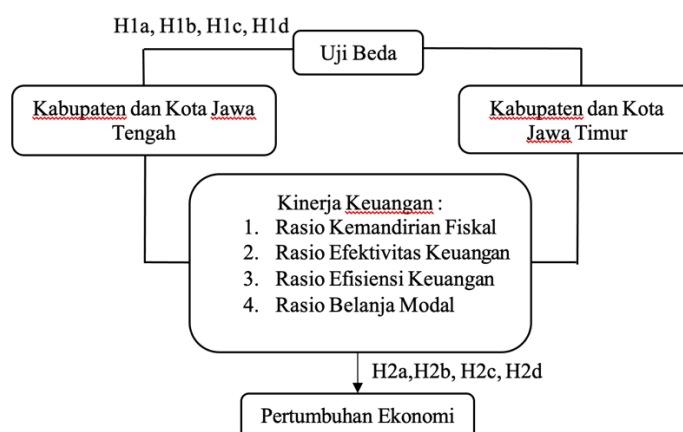
Rasio Belanja Modal

Strategi pembangunan infrastruktur daerah dapat diverifikasi secara kuantitatif dengan menghitung porsi belanja modal dalam postur APBD. Rasio ini mengevaluasi porsi anggaran yang didedikasikan untuk aset tetap terhadap seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Ernawati, 2024).

$$RB = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Model Penelitian

Analisis data riset ini mencakup uji non-parametrik *Mann-Whitney* dan model statistik regresi linear berganda. Kinerja keuangan dikaji mengaplikasikan Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas Keuangan, Rasio Efisiensi Keuangan, dan Rasio Belanja Modal. Berikut model penelitian analisis :



Pada hipotesis 2 yaitu uji pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi memiliki model penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.RK + \beta_2.REfk + \beta_3.REfs + \beta_4.RB + \epsilon$$

Keterangan:

- Y : Pertumbuhan Ekonomi
- α : Konstanta
- $\beta_1-\beta_4$: Koefisien Regresi
- RK : Rasio Kemandirian Fiskal
- REfk : Rasio Efektivitas Keuangan
- REfs : Rasio Efisiensi Keuangan
- RB : Rasio Belanja Modal
- ϵ : Error

4. Hasil dan Pembahasan

Studi memanfaatkan 288 observasi (292 data awal dengan 4 *outlier*) yang mencakup keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur periode 2020–2023. Pengujian yang pertama adalah statistik deskriptif.

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
----------	---	---------	---------	------	--------------------

Rasio Kemandirian Fiskal	288	.094691014	2.14628565	.309440576	.256087518
Rasio Efektivitas Keuangan	288	.591858129	2.18762040	1.05024305	.208617445
Rasio Efisiensi Keuangan	288	.843752312	1.16125442	1.00699779	.052110348
Belanja Modal	288	.053137753	.344634557	.134522249	.044669296
Pertumbuhan Ekonomi	288	-0.06455100	.088793851	.027179289	.032699593

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)

Statistik deskriptif menunjukkan variasi antarvariabel yang cukup memadai untuk analisis inferensial. Rasio Kemandirian Fiskal memiliki nilai rata-rata 0,309 dengan rentang 0,095 hingga 2,146. Rasio Efektivitas Keuangan memiliki rata-rata 1,050 dengan rentang 0,592 hingga 2,188. Rasio Efisiensi Keuangan memiliki rata-rata 1,007 dengan rentang 0,844 hingga 1,161. Rasio Belanja Modal memiliki rata-rata 0,135 dengan rentang 0,053 hingga 0,345. Prosedur pengujian hipotesis diawali dengan pelaksanaan uji asumsi klasik untuk memverifikasi kelayakan data statistik yang diaplikasikan. Uji normalitas Kolmogorov–Smirnov menunjukkan residual tidak berdistribusi normal (Asymp. Sig. = 0,000). Namun, analisis tetap dilanjutkan dengan mempertimbangkan prinsip Central Limit Theorem (CLT) pada ukuran sampel besar, sehingga estimasi tetap dinilai stabil dan inferensi masih layak dilakukan, meskipun hasil perlu diinterpretasikan secara proporsional (Kwak and Kim, 2017; Islam, 2018; Alwi, 2015; Antonoyiannakis, 2018). Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel bebas tidak mengalami multikolinearitas (Tolerance > 0,10 dan VIF < 10) (Katrutsa and Strijov, 2017). Uji heteroskedastisitas Spearman menunjukkan seluruh variabel memiliki signifikansi >0,05, sehingga model bebas heteroskedastisitas (Rice *et al.*, 2020). Uji autokorelasi menggunakan Durbin–Watson menghasilkan nilai 0,625, yang diinterpretasikan tidak menunjukkan autokorelasi positif (Chen, 2021). Pengujian perbedaan antar wilayah dilakukan dengan Mann–Whitney U (Qurraunnisa *et al.*, 2022) yang ditunjukkan tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Beda Metode Mann-Whitney

Model	Test Statistics ^a			
	Rasio Kemandirian Fiskal	Rasio Efektivitas Keuangan	Rasio Efisiensi Keuangan	Rasio Belanja Modal
Mann-Whitney U	9816.000	7980.000	3573.000	7982.000
Wilcoxon W	19269.000	19896.000	13026.000	17435.000
Z	-.747	-3.348	-9.592	-3.346
Asymp. Sig. (2-tailed)	.455	.001	.000	.001

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil menunjukkan Rasio Kemandirian Fiskal tidak berbeda signifikan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ($p=0,542$). Sebaliknya, Rasio Efektivitas Keuangan berbeda signifikan ($p=0,001$), Rasio Efisiensi Keuangan berbeda signifikan ($p=0,000$), dan Rasio Belanja Modal juga berbeda signifikan ($p=0,003$). Pengujian pengaruh dilakukan menggunakan regresi linear berganda (Akinbowale *et al.*, 2025). Model menghasilkan persamaan: $Y = -0,279 + 0,023X_1 + 0,031X_2 + 0,275X_3 - 0,081X_4 + \epsilon$.

Tabel 4: Hasil Uji F Simultan

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signifikansi
Regression	.053	4	.013	14.863	0,000 ^b
Residual	.254	283	.001		
Total	.307	287			

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)

Tabel 5. Hasil Uji T Parsial

Variabel	Coefficients ^a		Kesimpulan
	t	Signifikansi	
Konstanta	-6.618	.000	
Rasio Kemandirian Fiskal	3.290	.001	Berpengaruh signifikan
Rasio Efektivitas Keuangan	3.436	.001	Berpengaruh signifikan
Rasio Efisiensi Keuangan	6.969	.000	Berpengaruh signifikan
Rasio Belanja Modal	-1.835	.068	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2026)

Uji simultan menunjukkan model signifikan ($F=14,863$; $Sig.=0,000$), keseluruhan variabel bebas yang diuji berkekuatan penjelas secara simultan terhadap variabel terikat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, Rasio Kemandirian Fiskal ($t=3,290$; $p=0,001$), Rasio Efektivitas Keuangan ($t=3,436$; $p=0,001$), dan Rasio Efisiensi Keuangan ($t=6,969$; $p=0,000$) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio Belanja Modal tidak signifikan ($t=-1,835$; $p=0,068$). Angka Adjusted R^2 0,162 berhasil mengidentifikasi 16,2% faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan ruang bagi penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi 83,8% faktor lainnya.

Pembahasan

Bagian ini mendiskusikan temuan uji beda dan regresi terkait kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara umum, temuan menegaskan bahwasanya kinerja fiskal daerah tidak sepenuhnya homogen antar wilayah, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja dibanding sekadar besaran alokasi.

Hasil uji beda menunjukkan Rasio Kemandirian Fiskal tidak berbeda signifikan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap transfer pusat masih relatif serupa pada kedua provinsi, sehingga variasi PAD belum menciptakan kesenjangan kemandirian fiskal yang bermakna. Dalam perspektif stewardship, pemerintah daerah diposisikan sebagai pengelola amanah publik yang bertanggung jawab meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber daya lokal dan tata kelola yang akuntabel (Hariani *et al.*, 2023). Ketidaksignifikanan ini dapat dipahami sebagai refleksi adanya hambatan struktural yang sebanding, seperti keterbatasan basis pendapatan daerah dan kapasitas administrasi fiskal, sehingga pola kemandirian antarprovinsi cenderung tidak berbeda secara statistik.

Sebaliknya, uji *Mann-Whitney* mengonfirmasi adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada variabel rasio efektivitas keuangan, efisiensi keuangan, dan belanja modal di antara kelompok sampel. Perbedaan efektivitas menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD terhadap target tidak seragam, yang dapat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pendapatan, ketepatan estimasi potensi fiskal, dan konsistensi implementasi kebijakan. Perbedaan efisiensi mencerminkan adanya variasi dalam kemampuan daerah mengelola belanja agar lebih produktif, sehingga output pembangunan yang dihasilkan dari sumber daya fiskal yang sama dapat berbeda antar wilayah. Sementara itu, perbedaan belanja modal mengindikasikan variasi prioritas investasi publik dan strategi pembangunan, baik dalam porsi anggaran maupun fokus program. Temuan ini menegaskan bahwa disparitas fiskal tidak hanya terkait kapasitas, tetapi juga terkait praktik manajerial dan tata kelola penganggaran.

Hasil regresi mengindikasikan bahwasanya Rasio Kemandirian Fiskal, Rasio Efektivitas Keuangan, dan Rasio Efisiensi Keuangan berkontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi. Hubungan positif ini menegaskan bahwa daerah dengan kemandirian yang lebih baik cenderung memiliki fleksibilitas lebih besar dalam menentukan belanja pembangunan dan mengurangi risiko ketergantungan fiskal. Efektivitas keuangan yang tinggi mengindikasikan kemampuan merealisasikan pendapatan sesuai target, sehingga stabilitas fiskal meningkat dan ruang pembiayaan pembangunan menjadi lebih kuat. Efisiensi yang baik menunjukkan kemampuan daerah mengoptimalkan output pembangunan melalui belanja yang hemat dan tepat sasaran, sehingga lebih berpotensi mendorong nilai tambah ekonomi.

Dalam kerangka *stewardship theory*, temuan ini menguatkan argumentasi bahwa pemerintah daerah sebagai steward yang mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab akan lebih mampu menghasilkan outcome pembangunan yang lebih baik. Stewardship menekankan orientasi pada kepentingan kolektif, integritas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh sebab itu, signifikansi kemandirian, efektivitas, dan efisiensi dapat diinterpretasikan sebagai bukti bahwa kualitas tata kelola fiskal merupakan mekanisme kunci yang menghubungkan kinerja pemerintah daerah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi, Rasio Belanja Modal tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis, belanja modal merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas produksi daerah melalui investasi publik dan pembentukan aset jangka panjang (Mulyana *et al.*, 2022; Bolen, 2019). Infrastruktur publik juga dipahami sebagai faktor penting dalam meningkatkan produktivitas, memperbaiki konektivitas, dan menurunkan biaya transaksi ekonomi (Chugunov dan Makohon, 2019; Kwistianus, 2022). Ketidaksignifikanan temuan mengonfirmasi peningkatan proporsi belanja modal tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada periode pengamatan.

Penjelasan yang paling relevan adalah adanya *time lag effect*, yaitu manfaat belanja modal cenderung baru terealisasi dalam jangka menengah atau panjang setelah proyek selesai dan mulai beroperasi (Collin and Weil, 2020; Barroy *et al.*, 2021). Selain itu, kontribusi belanja modal dapat melemah apabila proyek yang didanai tidak diarahkan pada sektor dengan dampak ekonomi tinggi atau implementasinya tidak optimal. Hal ini menegaskan bahwa belanja modal tidak cukup dinilai dari sisi besaran alokasi, tetapi harus dievaluasi dari sisi kualitas perencanaan, ketepatan prioritas, serta pengawasan pelaksanaan agar menghasilkan multiplier effect yang nyata.

Dalam perspektif *stewardship*, belanja modal idealnya diarahkan untuk menciptakan public value melalui proyek produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat (Maharani *et al.*, 2024). Pencapaian tersebut membutuhkan penguatan tata kelola, evaluasi manfaat, serta mekanisme kontrol agar belanja publik benar-benar menghasilkan output dan outcome pembangunan yang terukur (Schillemans and Hagen, 2019); Keay, 2016; Ayeni, 2020). Jika belanja modal tidak diarahkan secara tepat, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan dapat menjadi terbatas (Frida dan Karolina, 2020; Ezike, 2025).

5. Penutup

Kesimpulan

Studi dimaksudkan guna mengkaji perbedaan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi periode 2020 - 2023. Hasil uji *mann-whitney* menunjukkan bahwa rasio kemandirian fiskal tidak berbeda signifikan antarprovinsi, mengindikasikan tingkat ketergantungan terhadap transfer pusat yang relatif serupa. Sebaliknya, rasio efektivitas keuangan, rasio efisiensi keuangan, dan rasio belanja modal menunjukkan perbedaan signifikan, yang merefleksikan variasi kualitas tata kelola pendapatan dan belanja antar wilayah. Selanjutnya, hasil regresi membuktikan bahwa secara simultan kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, kemandirian fiskal,

efektivitas, dan efisiensi keuangan berkontribusi positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan bahwa daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih kuat, realisasi pendapatan yang lebih optimal, serta pengelolaan belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, rasio belanja modal tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi investasi publik tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan dalam horizon waktu penelitian. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya penguatan akuntabilitas, perencanaan, dan efektivitas implementasi kebijakan fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Keberhasilan penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari peran serta sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak yang penulis hormati. Terwujudnya artikel ini tidak lepas dari peran dosen pembimbing yang terus memberikan evaluasi konstruktif dan arahan yang sistematis. Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik dan infrastruktur selama proses penelitian. Selain itu, penulis menghargai instansi pemerintah daerah serta pihak terkait yang telah menyediakan akses data dan informasi, sehingga analisis dapat dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dukungan tersebut sangat membantu dalam memastikan kualitas dan ketepatan hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Akinbowale, O. E., Zerihun, M. F., & Mashigo, P. (2025). Banking and financial regulation in Sub-Saharan Africa: a systematic literature review and multiple regression approach. *Journal of Financial Regulation and Compliance*. <https://doi.org/10.1108/JFRC-09-2024-0170>
- Alwi, I. (2015). KRITERIA EMPIRIK DALAM MENENTUKAN UKURAN SAMPEL PADA PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIKA DAN ANALISIS BUTIR. *Jurnal Formatif*, 2(2), 140–148.
- Amalia, A. R., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(2), 80–101.
- Antonoyiannakis, M. (2018). Impact Factors and the Central Limit Theorem : Why citation averages are scale dependent &. *Journal of Informetrics*, 12(4), 1072–1088. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2018.08.011>
- Asri, J. D. (2016). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 1021–1034. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i2.4037>
- Ayeni, R. K. (2020). A Comparative Analysis Of Capital Expenditure On Infrastructure And Economic Growth In Nigeria And South Africa. *Society for Science and Education*, 8(3), 53–64.
- Azizah, R., Bagas, H., Rensa, H., Sinaga, J. B. L. A. B., & Sinaga, D. S. (2025). ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 14(1), 1627–1638. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i1.5538>
- Barroy, H., Cylus, J., Patcharanarumol, W., Novignon, J., & Gupta, S. (2021). Do efficiency gains really translate into more budget for health ? An assessment framework and country applications. *Health Policy and Planning*, 00, 1–9. <https://doi.org/10.1093/heapol/czab040>
- Bolen, K. K. (2019). The Effect of Financial Performance and Balanced Funds on Capital Expenditure of Local Government in District / City in Indonesia. *JPAP (Jurnal of Public*

- Administration and Governance*), 9(4), 129–147.
<https://doi.org/10.5296/jpag.v9i4.15583>
- Chen, Y. (2021). An analytical process of spatial autocorrelation functions based on Moran's index. *PLoS ONE*, 16(4 April), 1–27. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249589>
- Chugunov, I., & Makohon, V. (2019). FISCAL STRATEGY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC GROWTH. *Baltic Journal of Economic Studies*, 5(3), 213–217.
- Collin, M., & Weil, D. N. (2020). The Effect of Increasing Human Capital Investment on Economic Growth and Poverty : A Simulation Exercise. *Journal of Human Capital*, 1–43.
- Deborah, P. J., & Mangantar, M. (2020). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN KABUPATEN KEPULAUAN SITARO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(1), 292–301.
- Devinci, M. Y., Dekrita, Y. A., & Samosir, M. S. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 9(2).
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16, 49–64.
<https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Ernawati, Y. (2024). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Pemerintah Kota Medan). *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4(1), 143–158. <https://doi.org/10.47353/bj.v4i1.293>
- Ezike, O. E. (2025). IMPACT OF GOVERNMENT CAPITAL EXPENDITURE ON ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA. *International Journal of Business and Allied Studies*, 3(1), 231–246.
- Fatmawati, A. P. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Riau. *Land Journal*, 2(2), 92–104. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1357>
- Fitriyani, I., Kadewi Sumbawati, N., Rachman, R., Ekonomi dan Manajemen, F., & Samawa Sumbawa Besar, U. (2024). Peran Entrepreneur dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 12–24.
<https://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1625>
- Frida, A., & Karolina, L. (2020). Infrastructure Investment and Its Impact to Regional Development. *Economics Development Analysis Journal*, 9(24), 269–280.
- Ganie, D., Saputra, H. J., & Hasyim, W. (2023). *Analysis of The Implementation of Performance-Based Budgeting For Village Funds (Case Study In Berau District)*. 17, 40–53.
- Hariani, S., Veny, Xiaoli, C., & Mohammed, I. S. (2023). ANALYSIS OF FINANCIAL RATIOS TO ASSESS LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE IN LABUHAN BATU DISTRICT, NORTH SUMATRA, INDONESIA. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 5, 16–24.
- Hutagaol, Y. R. T., Sinurat, R. P. P., & Shalahuddin, S. M. (2022). Strategi Penguatan Keuangan Negara Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global 2023 Melalui Green Economy. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 378–385.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1911>
- Indrijawati, A., Mirwana, & Utami, I. A. (2024). Literature Review : Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 9, 1–6.
- Islam, M. R. (2018). Sample Size and Its Role in Central Limit Theorem (CLT). *International Journal of Physics & Mathematics*, 1, 37–46.
- Karina, N. N., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 14(2), 146–166.
<https://doi.org/10.35313/ekspansi.v14i2.4512>

- Keay, A. (2016). Stewardship theory : is board accountability necessary? *International Journal of Law and Management*, January. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Khofifah, T., & Witono, B. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja untuk Menilai Kinerja Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota Pada Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. *Economic and Digital Business Review*, 5(2), 898–917.
- Kopong, S. L. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012-2016 (Studi Pada Empat Kabupaten Pemekaran Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 7, 31–44.
- Kusumadewi, W. N., & Ilat, V. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2014. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 634–644.
- Kwak, S. G., & Kim, J. H. (2017). Central limit theorem: the cornerstone of modern statistics. *Korean Journal of Anesthesiology*, 70.
- Kwistianus, H. (2022). Asian Economic and Financial Review THE LONG-TERM PERFORMANCE OF CAPITAL EXPENDITURE FROM A FUNDAMENTAL PERSPECTIVE : EVIDENCE FROM Keyword s. *Asian Economic and Financial Review*, 12(12), 1027–1040. <https://doi.org/10.55493/5002.v12i12.4667>
- Lestari, A. A., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. 25(4), 125–134.
- Lestari, T. K., Santoso, D. B., & Saputra, P. M. A. (2022). KETERKAITAN GLOBALISASI DENGAN PERTUMBUHAN INKLUSIF PADA NEGARA-NEGARA ASEAN BERPENDAPATAN MENENGAH. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 79–102.
- Maharani, A. Z., Annundi, A. S., Wulansari, F. W., Susanti, I. A., & Ardhiarisca, O. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 65–74.
- Maharani, Y., & Marheni. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KRISIS EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19: (STUDI KASUS INDONESIA). *JEMASI : Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 17(1), 34–38. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/download/532/154>
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295>
- Melmambessy, D. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA JAYAPURA DITINJAU DARI RASIO KEMANDIRIAN DAERAH, KETERGANTUNGAN DAERAH, DESENTRALISASI FISKAL DAN EFEKTIVITAS. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13, 10–15.
- Mulyana, M., Din, M., & Mustamin, M. (2022). Local Government Own-source Revenue and General Allocation Funds on Capital Expenditure : Economic Growth as Moderating Variable. *Journal of Business Management and Accounting*, 6(1), 44–54.
- Murwaningsari, E. (2006). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11, 30–41.
- Nuraini, F., Andi, K., Amelia, Y., & Dharma, F. (2019). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI DI INDONESIA (Studi Pada Provinsi di Jawa dan di Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 24(1), 23–35. <https://doi.org/10.23960/jak.v24i1.115>
- Nurani, I., & Saleh, M. (2023). Peran Belanja Modal Sebagai Efek Mediasi Pada Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Dimensi*, 12(1), 346–363. <https://doi.org/10.33373/dms.v12i1.5683>

- Nurhayati, N., & Juliansyah, H. (2023). Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v12i1.12212>
- Pantas, O. O., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penurunan Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(01), 36–47. <https://doi.org/10.35794/jpekd.23452.20.01.2019>
- Prihatin, W. A., Arintoko, A. A., & Siharno, S. S. (2019). Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(3). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i3.1383>
- Purwadi, P., Asmara, A. Y., Nashihuddin, W., Pradana, A. W., Dinaseviani, A., & Jayanthi, R. (2020). Inovasi Pelayanan Publik di China: Suatu Pembelajaran bagi Pemerintah dalam Peningkatan Layanan Publik di Indonesia. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 86–113. <https://doi.org/10.25077/jakp.5.1.86-113.2020>
- Putri, M. F., & Islahuddin. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA KAWASAN METROPOLITAN MEBIDANGRO TAHUN ANGGARAN 2011-2014. *Journal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 317–334.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamalang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 5(3), 2296–2313.
- Putri, V. E., & Junaidi. (2020). THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH OF PROVINCES IN INDONESIA. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)*, 2(2), 76–83. <https://doi.org/10.46923/ijbhes.v2i2.84>
- Qurratunnisa, R., Septiyanti, R., Syaipudin, U., & Dharma, F. (2022). Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2019). *E-Journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship*, 1(1), 59–70. <https://doi.org/10.23960/efeb.v1i1.18>
- Ratnawati, R., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada Provinsi Di Pulau Kalimantan Dan Sumatera Periode 2020-2022). *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 125. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1515>
- Renggo, Y. R. (2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13226>
- Restiana, Isma, A., & Prasaja, A. S. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022. *EBISMAN: EBisnis Manajemen*, 2(1), 08–24. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/EBISMAN/article/view/329>
- Rezka, R., Supri, Z., & Riyanti, R. (2023). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Al-Buhuts*, 19(1), 238–254.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1897–1913. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Riady, A. B., Bulutoding, L., & Syariati, N. E. (2024). PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH PANDEMI COVID-19. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2), 40–55. www.kemenkeu.go.id

- Rice, G., Wirjanto, T., & Zhao, Y. (2020). Tests For Conditional Heteroscedasticity of Functional Data. *Journal of Time Series Analysis*, 41(6), 733–758. <https://doi.org/10.1111/jtsa.12532>
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Rusmini, M. ., Cahyono, D. N., Putri, K., Izza Afkarina, Aprilia, P., Taufiq, A., Lestari, D. P., Silvia, K. J., Misrul, & Firmada, B. A. (2023). Bangkitnya Perekonomian Indonesia Pasca Covid-19. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 12(1), 59–75. <https://www.jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/IAB/article/view/1327/952>
- Schillemans, T., & Hagen, K. (2019). Trust and Verification : Balancing Agency and Stewardship Theory in the Governance of Agencies. *International Public Management Journal*, 0(0), 1–35. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1553807>
- Sevigo, A. E., & Lathifah, N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2022. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(3), 715–724. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1192>
- Solihin, D. (2025). KEMANDIRIAN FISKAL KOTA PALANGKA RAYA : ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2021 – 2024. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 9(2), 34–44.
- Sudarlan, S., Fitriana, R., & Mujiato, R. D. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun 2014-2018. *Jurnal EKSIS*, 18(2), 1–18. <https://doi.org/10.46964/eksis.v18i2.304>
- Tri, A. S. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.
- Venni, R., Ahmad, A. W., & Maryati, U. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1134. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1372>
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>
- Zulkarnain, M., Astuti, Y., & Wiriani, E. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 65–73.